



LKj IP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 dapat disusun. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Laporan ini berupaya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang dapat diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar selama Tahun 2024 dengan membandingkannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kesehatan di Kota Blitar, yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**, dan mendukung Visi Pemerintah Kota Blitar, yaitu **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”** dengan berupaya mewujudkan Misi ke-2 Pembangunan Kota Blitar yaitu **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter”**.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Melalui penyusunan laporan ini kami sangat mengharapkan adanya masukan umpan balik yang akan berguna dalam proses perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar di masa mendatang. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna penyempurnaan di waktu yang akan datang.

Blitar, Februari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR



dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680305 200112 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar sesuai dengan Rencana Strategis 2021-2026 adalah **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**. Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar menetapkan sasaran dalam Renstra tahun 2021-2026, **“Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan”** dan **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”**.

Perumusan keberhasilan pencapaian kinerja jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan. Dinas Kesehatan Kota Blitar telah menetapkan 6 (lima) Indikator Kinerja Utama yang merupakan Indikator Sasaran dan 1 (satu) indikator Sasaran lainnya, untuk menjadi tanggung jawab organisasi dan harus dicapai setiap tahunnya selama periode Renstra.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 adalah:

1. Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Prevalensi Balita Stunting;
4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi;
6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
7. IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar; dan
8. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar;

Dalam Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 ditetapkan 4 (empat) program upaya strategis dan 1 (satu) program pendukung/Administrasi Umum, meliputi:

Program Upaya Strategis:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat;

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program Pendukung (Administrasi Umum):

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ditujukan untuk meningkatkan peran masing bidang, sekretariat dan sub bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam perumusan kebijakan Walikota demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Blitar, sehingga ke depan akan terwujud peningkatan derajat masyarakat Kota Blitar yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2024 oleh masing-masing bidang, sekretariat dan sub bagian dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang, sekretariat dan sub bagian Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai.

Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan						
Angka Kematian Ibu (AKI)	98,14 per-100.000 kelahiran hidup	173,99 per-100.000 kelahiran hidup	22,71%	591.830.869,00	587.836.100,00	99,33%
Angka Kematian Bayi (AKB)	9,09 per-1.000 kelahiran hidup	7,39 per-1.000 kelahiran hidup	118,7%	34.403.800,00	29.119.000,00	84,64%
Prevalensi balita stunting	6,95%	6,87%	101,15%	867.504.700,00	819.618.873,00	94,48%
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	46,1%	33,15%	77,15%	43.063.971.688,00	41.338.983.316,00	95,99%
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	75%	76,92%	102,56%	12.000.577.806,00	11.196.634.940,00	93,30%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	84 (indeks)	86,78 (indeks)	103,31%			

Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,70 (skala)	0,79 (skala)	112,56%	2.666.311.271,00	2.623.421.132,00	98,39%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah						
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (85,72)	A (85,07)	99,24%	31.492.277.533,00	30.937.612.888,00	98,24%
Total				90.716.877.667,00	87.533.226.249,00	96,49%

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian akuntabilitas keuangan/kinerja keuangan sebesar **96,49%** dengan realisasi Rp. 87.533.226.249,00 dikategorikan "**sangat berhasil**".

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2024 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai rata-rata capaian kinerja **91,56%** atau "**berhasil**" dan masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek-aspek Strategis	8
F. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	14
A. Rencana Strategis 2021-2026	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	20
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	22
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024	39
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	42
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur (Target SPM)	43
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)	45
1. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	56
2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
C. Prestasi/Penghargaan	64
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Langkah Perbaikan	70

Lampiran-Lampiran

- A. Matriks Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Jabatan Tahun 2024	8
Tabel 1.2	Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Golongan Tahun 2024	9
Tabel 1.3	Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan Tahun 2024	10
Tabel 1.4	Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022-2024	11
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024	17
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024	22
Tabel 3.2	Data Balita Stunting Kota Blitar Tahun 2024	26
Tabel 3.3	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Kota Blitar Tahun 2024	30
Tabel 3.4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sesuai Unsur Tahun 2024	32
Tabel 3.5	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tahun 2024	34
Tabel 3.6	Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Blitar Tahun 2021 – 2024	37
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2024	40
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	42
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur	43
Tabel 3.10	Anggaran Belanja Daerah pada Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan Keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024	45
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024	46
Tabel 3.12	Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	57
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Anggaran	62
Tabel 4.1	Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2024 ...	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Kota Blitar mempunyai peran membantu Walikota Blitar dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Blitar berperan strategis dalam mewujudkan visi Pembangunan Kota Blitar 2021-2026, yakni **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”** dan pelaksanaan 5 (lima) misi pembangunan, khususnya misi ke-2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani Rohani, Cerdas dan Berkarakter.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Blitar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dan alat bantu dalam upaya perbaikan Dinas Kesehatan Kota Blitar secara berkesinambungan di masa yang akan datang dalam rangka pemenuhan aspek akuntabilitas.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

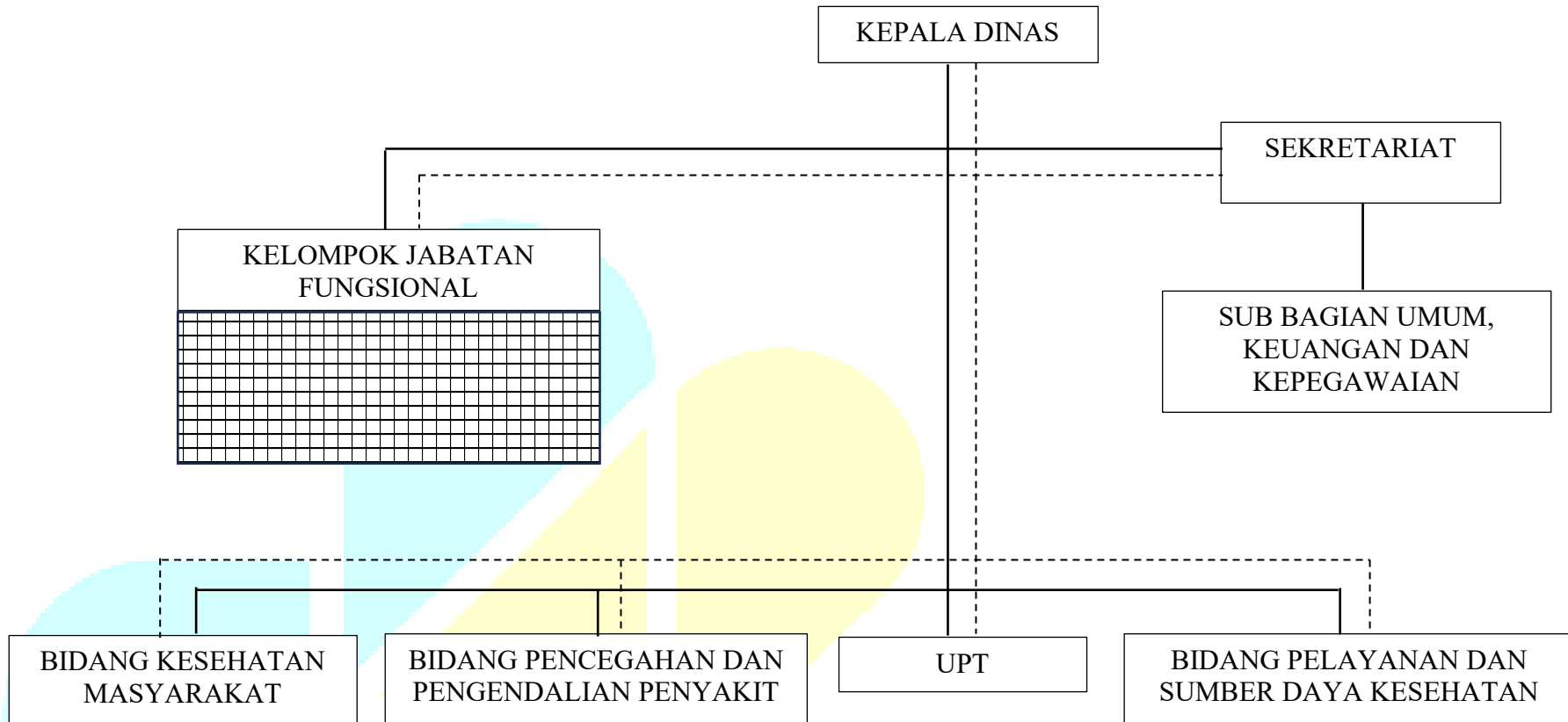
Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Kesehatan menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang didalamnya tertuang Tujuan dan Sasaran Tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa *output* dan *outcome* beserta target tahunan yang jelas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- j. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;

- k. pengendalian penyakit, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
- q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- r. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- s. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- t. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- u. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- v. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

[illegible]

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024, dengan tujuan:

1. mengetahui capaian kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya;
3. sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;

17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

E. Aspek-Aspek Strategis

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar sampai dengan Desember 2024 adalah sebanyak 298 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	2
4.	Pejabat Fungsional	254
5.	Staf/Fungsional Umum	37
Jumlah		298

Tabel 1.2
Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Golongan
Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	31
2.	Golongan III	164
3.	Golongan II	34
4.	Golongan I	1
6.	PTT	6
5.	PPPK	62
Jumlah		298

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Blitar memiliki sarana/prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar maupun operasional UPT dibawahnya, yaitu UPT Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

- a. Kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar dilaksanakan di:
Kantor utama yang terletak di Jalan Sudanco Supriyadi No. 61 Blitar.
- b. Adapun kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan di UPT Dinas Kesehatan yang terletak di:
 - 1) UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Jalan Ciliwung No.178;
 - 2) UPT Puskesmas Sukorejo, Jalan Cemara No.163;
 - 3) UPT Puskesmas Sananwetan, Jalan Jawa No.07,
 - 4) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, Jalan Ciliwung No.180;

Sedangkan jumlah sarana kesehatan lainnya menurut kepemilikan, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan Tahun 2024

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilik/Pengelola			Jumlah
		Pemerintah Daerah	TNI/ POLRI	Swasta	
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Sakit				
	Rumah Sakit Umum	1		4	5
	Rumah Sakit Khusus			1	1
2.	Puskesmas dan Jaringannya				
	Puskesmas Rawat Inap	0			0
	Puskesmas Non Rawat Inap	3			3
	Puskesmas Pembantu	17			17
3.	Sarana Pelayanan Lain				
	Balai pengobatan/klinik		2	21	23
	Praktik Dokter Umum Perorangan			45	45
	Praktik Dokter Gigi Perorangan			29	29
	Praktik Dokter Spesialis Perorangan			22	22
	Praktik Pengobatan Tradisional			260	260
	Unit Tranfusi Daerah			2	2
4.	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian				
	Apotek	1		57	58
	Toko Obat			7	7

Sumber : Data Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kota Blitar cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan

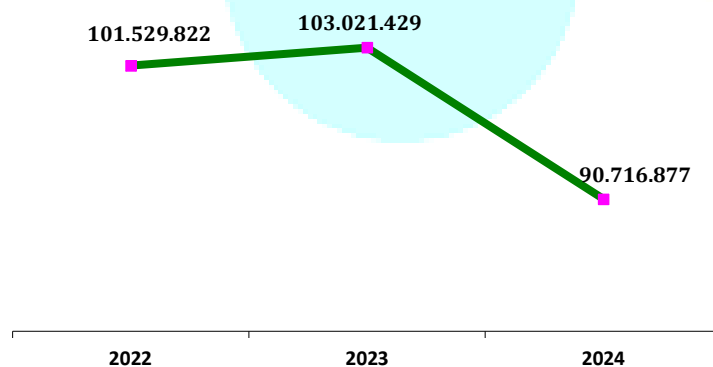
Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, yang berdasar APBD Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tahun 2022 - 2024

No.	Uraian	Jumlah Anggaran		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1.	Belanja Daerah:			
	Dinas Kesehatan	92.942.335.842,00	93.901.357.444,00	86.247.427.226,00
	UPT PKM Kepanjenkidul	2.911.838.360,00	2.978.287.346,00	1.369.810.369,00
	UPT PKM Sukorejo	2.401.512.891,00	2.899.332.589,00	1.528.181.182,00
	UPT PKM Sananwetan	3.274.135.735,00	3.242.451.678,00	1.572.095.549,00
	Jumlah Anggaran	101.021.731.210,00	103.021.429.057,00	90.716.877.667,00

Dari tabel diatas perkembangan pembiayaan kesehatan pada Dinas kesehatan Kota Blitar untuk Pembiayaan Belanja langsung, dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan
Tahun 2022-2024/000.



Anggaran yang tercantum dalam APBD Kota Blitar pada DPA Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kota Blitar bersumber dana dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK-Kes (Dana Alokasi Khusus Kesehatan), DAK Non-Fisik (Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOK), BOK-BPOM, DBHPR (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok), DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan JKN-FKTP (Jaminan Kesehatan Nasional – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

Penerimaan APBD Dinas Kesehatan Tahun 2024 menurun dibandingkan dengan penerimaan APBD Tahun 2023 antara lain:

1. BK Provinsi Jawa Timur sudah tidak menerima lagi karena pembiayaan diserahkan kepada Pemerintah Kota Blitar.
2. Penerimaan DAK Non-Fisik (BOK) menurun 22% karena menu yang diusulkan tidak disetujui Kemenkes.
3. BOK-BPOM menurun 25% karena penerimaan berfokus pada pelaksanaan kegiatan Kesehatan lingkungan, pengelolaan farmasi tidak didanai lagi.
4. DAK Fisik Kesehatan beralih dari pengadaan antropometri Kesehatan menjadi Pembangunan PSC (*Public Savety Center*) tetapi menurun 40%.
5. DAU menurun 12% karena focusing Pembangunan daerah.
6. DBHCHT dan DBHPR menurun 9% dan 16% karena dipengaruhi penerimaan pajak atas tembakau dan rokok.
7. JKN-FKTP meningkat 4% karena kenaikan jumlah peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

F. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Adapun permasalahan yang dihadapi pada pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Masih ada kematian ibu sebanyak 4 orang;
2. Masih ada kematian bayi sebanyak 16 bayi;
3. Masih adanya balita stunting sebanyak 539 balita;

4. Masih ada fasyankes yang belum terkoneksi dengan Rekam Medik Elektronik (RME) sehingga belum dapat dihitung capaian pelayanan kesehatannya;
5. Masih ada fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi sebanyak 9 fasyankes dari 39 fasyankes yang seharusnya terakreditasi; dan
6. Masih rendahnya indeks keluarga sehat (0,79).

Beberapa Isu Strategis yang berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan di Kota Blitar Tahun 2024, diantaranya:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Penurunan prevalensi balita stunting;
4. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peningkatan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar; dan
6. Peningkatan jumlah keluarga sehat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun ke depan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah ***“Kota Blitar KEREN : Unggul, Makmur, Bermartabat”***.

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

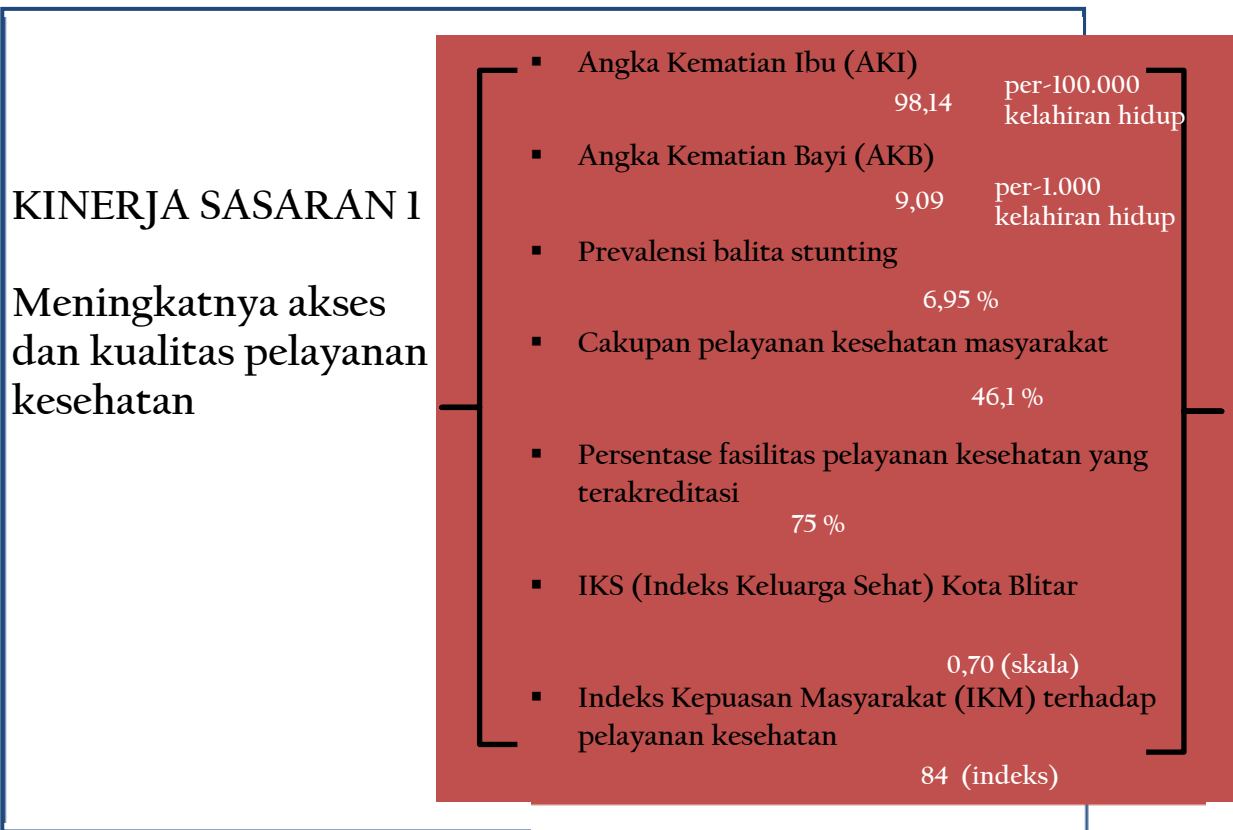
1. Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital;
4. Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan;
5. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagaimana dalam ***“Lampiran. 1 LKj IP 2024: Matriks Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021-2026”***.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-2 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA PD Tahun

2021-2026. Perjanjian kinerja Tahun 2024 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama.



Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, serta dalam mempertanggungjawabkan kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian dari Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta (100.000) bayi lahir hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	IKU
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	IKU
		Prevalensi Balita Stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	IKU
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	IKU
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	IKU
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Blitar	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan	
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Sekretariat	Laporan Sekretariat	

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 ada 3 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota Blitar;
2. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dan;
3. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan dengan Tim Kerja;

Untuk perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam **"Lampiran 3 LKj IP 2024"**.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam **"Lampiran 2 LKj IP 2024"**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Blitar selaku pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah yang didukung dengan program dan kegiatan. Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Pengukuran Capaian Kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024, serta membandingkan dengan target nasional. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

1. **Rumus 1:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. **Rumus 2:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	2	3	4
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Kesehatan Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	98,14 per-100.000 kelahiran hidup	173,99 per-100.000 kelahiran hidup	22,71
	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	9,09 per-1.000 kelahiran hidup	7,39 per-1.000 kelahiran hidup	118,70
	3. Prevalensi balita stunting	6,95%	6,87%	101,15
	4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	46,1%	33,15%	71,91
	5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	75%	76,92%	102,56
	6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	84 (indeks)	86,78 (indeks)	103,31
	7. IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,70 (skala)	0,79 (skala)	112,86
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	8. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (85,72)	A (85,07)	99,24

Sasaran 1 “Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan”, merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, yaitu:

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan dan nifas. Angka Kematian Ibu adalah banyaknya wanita meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kasus kecelakaan atau insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan usia kehamilan per-100.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Jumlah kasus kematian ibu terkait kehamilan, persalinan dan masa nifas Kota Blitar tahun 2024 sebanyak 4 kasus dengan jumlah kelahiran hidup di tahun yang sama sebanyak 2.299 kelahiran hidup. Maka AKI Kota Blitar tahun 2024 sebesar 173,99 per-100.000 kelahiran hidup telah memenuhi target daerah sebesar 98,14 per 100.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 22,71%.

Kematian ibu sebanyak 4 kasus disebabkan oleh 1 kasus emboli ketuban, 1 kasus penyakit jantung, 1 kasus penurunan berat badan karena hiperemesis, dan 1 kasus karena hipotiroid. Jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan sudah sesuai standar fasilitas kesehatan dan kinerja kader pendamping bumil risti mendapat pengawasan dari nakes wilayah adalah faktor pendukung dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu.

Penyebab kematian ibu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- Belum dilakukan skrining Penyakit Jantung pada ibu hamil (Ibu disertai penyakit penyerta).
- Kompetensi dari kader pendamping bumil risti belum terukur.
- Kegiatan drill kegawatdaruratan belum dilakukan secara periodik di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RS).
- Ibu hamil dalam kondisi 4T (terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak).

- Adanya faktor medis dan non medis terkait (diagnosis, tatalaksana serta koordinasi antar tenaga kesehatan).

Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan angka kematian ibu Kota Blitar antara lain:

- Pelaksanaan skrining penyakit jantung akan dijadikan salah satu standar yang wajib dilakukan dalam pemeriksaan ibu hamil.
- Pelaksanaan pelatihan 25 kompetensi kader posyandu.
- Drill kegawatdaruratan maternal neonatal bagi tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RS) se-Kota Blitar.
- Koordinas terkait pembentukan dan evaluasi jejaring skrining layak hamil dan ANC.
- Pendampingan oleh Tim Ahli (Sp. OG) ke Puskesmas dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal dan audit Kasus Kematian Ibu dan Anak per 3 bulanan.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyak kematian bayi usi 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Jumlah kematian bayi Kota Blitar tahun 2024 sebanyak 17 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 2.299. Maka AKB Kota Blitar tahun 2024 sebesar 7,39 per-1.000 kelahiran hidup dari target daerah sebesar 9,09 per-1.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 118,70%.

Kasus kematian bayi di Kota Blitar disebabkan karena kelainan kongenital sebanyak 1 kasus, BBLR (berat badan lahir rendah) sebanyak 2 kasus, infeksi dan parasit 1 kasus, asfiksia sebanyak 1 kasus, respiratory and cardiovascular disorders 2 kasus, dan 1 kasus karena penyakit darah dan organ pembentukan darah serta proses imun. Jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan sudah sesuai standar fasilitas kesehatan adalah faktor pendukung dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

Kematian pada bayi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Belum optimalnya manajemen pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau RS terkait infeksi nosokomial.
- Bumil termasuk dalam 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak).
- Belum optimalnya tatalaksana bayi muda di Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit.
- Kurang optimalnya audit medik level II di rumah sakit.

Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan angka kematian bayi Kota Blitar antara lain:

- Refresing manajemen pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau RS.
- Monitoring dan evaluasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR), monitoring dan evaluasi skrining hipertiroid kongenital (SHK) dan pendampingan tim ahli tetap ditingkatkan.
- Refreshing tatakelola Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) bagi tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
- Rekomendasi dari Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) segera ditindaklanjuti.

c. Prevalensi balita stunting

Prevalensi balita stunting adalah persentase balita yang mengalami stunting di suatu populasi. Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Jumlah balita stunting dari pengukuran balita pendek dan sangat pendek selama tahun 2024 adalah sebanyak 539 balita dari 7.849 balita Kota Blitar yang dikukur. Sehingga menghasilkan angka prevalensi balita stunting sebesar 6,87% dari target

6,95% dengan capaian 101,15% yang artinya sudah mencapai target tahun 2024.

Tabel 3.2 Data Balita Stunting Kota Blitar Tahun 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	BALITA DIUKUR	SANGAT PENDEK	PENDEK	STUNTING	%
1	UPT PUSKESMAS SUKOREJO	2.815	80	113	193	6,86
2	UPT PUSKESMAS KEPANJENKIDUL	2.081	24	84	108	5,19
3	UPT PUSKESMAS SANANWETAN	2.953	38	200	238	8,06
	JUMLAH	7.849	142	397	539	6,87

Menurut UNICEF (1998), pertumbuhan dipengaruhi oleh sebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya adalah asupan makanan dan keadaan kesehatan, sedangkan penyebab tidak langsung meliputi ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola pengasuhan anak, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia, ekonomi dan organisasi melalui faktor pendidikan. Penyebab paling mendasar dari tumbuh kembang adalah masalah struktur politik, ideologi, dan sosial ekonomi yang dilandasi oleh potensi sumber daya yang ada (Supariasa et al., 2012).

Status gizi ibu hamil sebagai risiko kelahiran bayi dengan kondisi stunting. Selain itu tingkat pendidikan, ekonomi, keadaan sosial, sanitasi, dan keterjangkauan pangan mempengaruhi status gizi keluarga juga mempengaruhi kejadian kasus stunting pada balita. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanganan stunting sejak dini adalah permasalahan prevalensi stunting Kota Blitar. Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan prevalensi balita stunting Kota Blitar adalah:

- Gerakan aksi bergizi pada remaja.
- Pemberian TTD pada remaja putri.
- Sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan stunting melalui media cetak dan elektronik

- Penyuluhan langsung tentang pencegahan stunting ke SMP dan SMA melalui UKS dan kader kesehatan.

Kerjasama lintas sektor yang baik dalam upaya penurunan angka stunting pada Balita dari kegiatan Konvergensi Stunting adalah faktor pendukung dalam upaya penurunan prevalensi balita stunting.

d. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, mempunyai posisi yang strategis dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas merupakan ujung tombak terdepan dalam pembangunan kesehatan di masyarakat, mempunyai peran cukup besar dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

Untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan penyelenggaraan upayanya, Puskesmas dilengkapi dengan instrumen manajemen yang terdiri dari: Perencanaan Tingkat Puskesmas, Lokakarya Mini Puskesmas, Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang mencakup penilaian kinerja UKM esensial, UKM pengembangan, UKP, manajemen dan mutu Puskesmas.

Pelayanan di UPT Puskesmas mendukung kesetaraan dalam pelayanan. Yang mana cakupan layanan kesehatan menggambarkan keterjangkauan layanan kesehatan tersebut. Cakupan layanan kesehatan diukur melalui angka kontak setiap pasien di UPT Puskesmas yang mana dihitung menurut per-pasien. Untuk memonitor tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan di Puskesmas. Selain itu cakupan layanan di Puskesmas menjadi salah satu indikator dalam pemenuhan kapitasi berbasis kinerja yang mana minimal setiap bulan puskesmas dapat

mencapai cakupan layanan/angka kontak 150 permil. Cakupan pelayanan kesehatan adalah konsep yang menggambarkan seberapa besar interaksi antara layanan kesehatan dengan sasarannya. Cakupan ini mencakup seluruh proses, mulai dari alokasi sumber daya hingga pencapaian tujuan. Cakupan pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah kunjungan per masing-masing orang di setiap fasilitas pelayanan kesehatan setiap tahun. Sementara ini cakupan pelayanan kesehatan yang tergambar adalah cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas belum menggambarkan cakupan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat adalah perhitungan jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%. Kunjungan ini terdiri dari kunjungan baru pasien sakit dan sehat yang dihitung dalam tahun yang sama.

Jumlah kunjungan baru di fasilitas pelayanan kesehatan baik dalam dan luar gedung sebanyak 53.220 orang terhadap 161.204 orang penduduk Kota Blitar. Jadi cakupan pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebesar 33,15% dari target 46,1%, sehingga capaiannya sebesar 71,91%.

Adapun permasalahan dalam pencapaian kinerja ini adalah belum semua fasilitas kesehatan melaporkan pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan, sehingga diperlukan upaya tindak lanjut berupa fasilitasi secara bertahap aplikasi RME (rekam medik elektronik) kepada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk meningkatkan cakupan pelaporan kesehatan ke Dinas Kesehatan.

e. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi

Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh,

berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS.

Tujuan utama akreditasi Fasilitas pelayanan kesehatan adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam pelayanan harus mengedepankan kualitas mutu pelayanan bagi masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan sesuai standar bagi masyarakat. Standar mutu pelayanan fasilitas kesehatan dinilai melalui penilaian akreditasi fasyankes.

Akreditasi Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Fasilitas Kesehatan, yang dilakukan oleh lembaga

independen yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pembinaan dan penilaian akreditasi fasilitas kesehatan di Kota Blitar dilaksanakan pada 6 Rumah Sakit, 3 Puskesmas, 23 Klinik, 2 Unit Transfusi Darah, dan 5 Laboratorium Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi
Kota Blitar Tahun 2024**

NO	FASILITAS KESEHATAN	STATUS AKREDITASI
Rumah Sakit		
1	RSUD Mardi Waluyo	Paripurna
2	RSK Budi Rahayu	Paripurna
3	RSU Aminah	Paripurna
4	RSI Aminah	Paripurna
5	RSU Syuhada Haji	Paripurna
6	RSIA Tanjungsari	Utama
Puskesmas		
1	UPT Puskesmas Sananwetan	Paripurna
2	UPT Puskesmas Sukorejo	Paripurna
3	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	Paripurna
Laboratorium		
1	Labkesda Kota Blitar	Paripurna
2	Laboratorium Klinik Prodia	Paripurna
3	Laboratorium Klinik Sumber Waras	-
4	Laboratorium Klinik Ar-Rahman	-
5	Laboratorium Medis Veteran	-
Unit Transfusi Darah (UTD)		
1	UTD PMI Kabupaten Blitar	Paripurna
2	UTD PMI Kota Blitar	-
Klinik		
1	Klinik Pratama Siti Khodijah	Paripurna
2	Klinik Pratama Amanah	Paripurna
3	Klinik Pratama Sehat Sejahtera	Paripurna
4	Klinik Pratama Polkes 05.09.03	Paripurna
5	Klinik Pratama Polres Blitar Kota	Paripurna
6	Klinik Pratama Mediska	Paripurna
7	Klinik Utama Inoveye	Paripurna
8	Klinik Pratama Lapas Blitar	Paripurna
9	Klinik Pratama Anak Radja	Paripurna
10	Klinik Pratama dr Ivana	Paripurna
11	Klinik Pratama DSC Aesthetic	Paripurna
12	Klinik Pratama Rahmat Medika	Paripurna
13	Klinik Pratama Griya Ayu	Paripurna
14	Klinik Pratama Ayura	Paripurna
15	Klinik Pratama Naavagreen	Paripurna
16	Klinik Pratama Nikeisha Womencare	Paripurna

NO	FASILITAS KESEHATAN	STATUS AKREDITASI
17	Klinik Pratama Moromari	Utama
18	Klinik Pratama Sumber Waras	-
19	Klinik Pratama Vins' Aesthetic	-
20	Klinik Pratama Moza	-
21	Klinik Pratama Arre Dental Care	Paripurna
22	Klinik Pratama Beautee Glow Aesthetic	-
23	Klinik Pratama Prima	-

Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi sebesar 76,92% terdiri dari 6 Rumah Sakit, 3 Puskesmas, 18 Klinik, 1 Unit Transfusi Daerah, dan 2 Laboratorium Kesehatan yang sudah memiliki sertifikat akreditasi. Capaian tersebut melebihi target indikator sebesar 75%. Terbentuknya Tim TPCB untuk melaksanakan pembinaan akreditasi kepada fasyankes adalah faktor pendukung dalam peningkatan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi.

Regulasi terkait akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sering berubah, sehingga perlu dilakukan Sosialisasi dan moneyv secara berkala terhadap regulasi terkait akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang baru. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakredasi akan dilaksanakan pembinaan dan pendampingan oleh Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mengikuti penilaian akreditasi.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan Masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan UPT Puskesmas Kepanjenkidul Kota Blitar sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Timur, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Tabel 3.4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sesuai Unsur Tahun 2024

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM PER-UNSUR PELAYANAN
UPT Puskesmas Kepanjenkidul		
1	Persyaratan	85,73
2	Prosedur	86,28

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM PER- UNSUR PELAYANAN
3	Waktu Pelayanan	82,85
4	Biaya/Tarif	96,16
5	Produk Layanan	84,95
6	Kompetensi Pelaksana	86,32
7	Perilaku Pelaksana	88,10
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	95,71
9	Sarana dan Prasarana	84,81
10	Transparansi Petugas	84,98
11	Integritas Petugas	84,98
	NILAI IKM	86,48
UPT Puskesmas Sukorejo		
1	Persyaratan	83,34
2	Prosedur	83,25
3	Waktu Pelayanan	82,33
4	Biaya/Tarif	96,37
5	Produk Layanan	84,33
6	Kompetensi Pelaksana	85,16
7	Perilaku Pelaksana	82,52
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	90,90
9	Sarana dan Prasarana	83,60
10	Transparansi Petugas	85,49
11	Integritas Petugas	84,94
	NILAI IKM	85,66
UPT Puskesmas Sananwetan		
1	Persyaratan	86,52
2	Prosedur	85,60
3	Waktu Pelayanan	86,29
4	Biaya/Tarif	86,28
5	Produk Layanan	86,53
6	Kompetensi Pelaksana	87,69
7	Perilaku Pelaksana	87,48
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	85,69

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM PER-UNSUR PELAYANAN
9	Sarana dan Prasarana	86,63
10	Transparansi Petugas	87,45
11	Integritas Petugas	87,55
	NILAI IKM	88,21

Tabel 3.5 Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	HASIL IKM
1	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	86,48
2	UPT Puskesmas Sukorejo	88,21
3	UPT Puskesmas Sananwetan	85,66
	RATA-RATA IKM	86,78

Capaian IKM sudah mencapai target, akan tetapi dari capaian IKM di UPT Puskesmas Sukorejo dan UPT Puskesmas Kepanjenkidul nilai terendah masih terkait waktu pelayanan dan di UPT Puskesmas Sananwetan terkait dengan penanganan pengaduan.

g. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar

Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Dalam pelaksanaanya UPT Puskesmas wajib melaksanakan kegiatan PIS-PK. Puskesmas Wajib Mendata Seluruh Keluarga yang ada di Wilayah Kerjanya. Pendataan yang biasa dilakukan dengan kunjungan rumah (keluarga) ini harus dilakukan secara terjadwal dan rutin. Nantinya, Puskesmas bisa memanfaatkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga (Family Folder) ini untuk intervensi masalah kesehatan yang ditemui.

Program PIS-PK atau yang lebih dikenal dengan Program Keluarga Sehat adalah salah satu program puskesmas yang menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran. Pendekatan keluarga merupakan strategi atau pendekatan pelayanan terintegrasi antara upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang didasari oleh data dan informasi profil kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah. Terdapat 12 indikator kesehatan yang dinilai pada program PIS-PK ini, indikator tersebut antara lain:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Indikator PIS-PK dapat dilakukan intervensi melalui kunjungan langsung atau edit data menggunakan data sekunder yang telah dimiliki UPT Puskesmas misalnya untuk data indikator Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, dan Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Selain melalui data sekunder juga dapat dibandingkan dengan data pada RME simpustronik yang ada di UPT Puskesmas untuk data hipertensi berobat teratur. Setiap intervensi yang dilakukan akan merubah capaian IKS yang dapat dilihat melalui aplikasi *jatim-keluargasehat* akan tetapi karena aplikasi tidak update dari awal Tahun 2023, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar mengupayakan adanya pengolahan data secara manual dengan KS final. Oleh karena itu, setelah dilaksanakannya intervensi pada triwulan III maka perlu dilakukan olahan data KS final di triwulan III untuk mengetahui progress IKS serta perlu dilakukan *monev* sebagai upaya peningkatan IKS Kota Blitar

Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan data per-31 Desember 2024 sebesar 0,79 melebihi dari target daerah 0,70, yaitu dengan capaian 112,86% termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Kota Blitar termasuk dalam kategori “**keluarga pra sehat**” dengan perhitungan jumlah keluarga sehat dibanding jumlah seluruh keluarga di Kota Blitar. Adapun nilai untuk masing-masing indikator Keluarga Sehat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Blitar
Tahun 2021 - 2024

No.	Indikator Keluarga Sehat	Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	44,83	54,49	61,20	91,63
2.	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	98,14	99,10	98,95	100
3.	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	98,26	99,28	99,27	99,40
4.	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	88,02	91,12	91,93	99,42
5.	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	96,25	97,51	97,49	100
6.	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	36,02	44,02	64,65	86,65
7.	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	27,81	37,23	39,72	76,95
8.	Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan	36,88	60,00	65,15	88,58
9.	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	56,44	59,98	61,42	80,65
10.	Keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN)	57,12	65,52	73,06	100
11.	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	98,43	98,98	99,05	99,66
12.	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	98,22	98,63	98,77	99,68
Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar		0,28	0,35	0,41	0,79

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar tahun 2024 naik dari capaian tahun 2021 sebesar 0,51. IKS Kota Blitar telah mencapai kenaikan menjadi 0,79 (Pra sehat), akan tetapi masih memerlukan minimal 0,02 untuk mencapai status keluarga sehat. Capaian indikator yang dapat ditingkatkan di Tahun 2025 untuk mencapai status keluarga sehat adalah:

1. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

Indikator tersebut masih bercampur antara benar-benar penderita hipertensi atau masih probable hipertensi. Oleh karena itu perlu ditelusuri lagi untuk warga yang tidak menderita hipertensi tetapi tidak dilakukan pengukuran tekanan darah, perlu dilakukan intervensi untuk menginputkan data pengukuran tekanan darah dari hasil simpustronik ataupun dengan kunjungan keluarga. Sehingga diharapkan capaian keluarga dengan indikator hipertensi berobat teratur bisa meningkatkan capaian indikator.

2. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

Penderita gangguan jiwa yang dimasukkan kedalam indikator ini adalah penderita gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, sehingga perlu dilakukan kroscek dengan programmer serta konfirmasi ulang dengan kunjungan keluarga untuk merubah status indikator tersebut.

3. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

Indikator tersebut masih dapat ditingkatkan capaiannya dengan cara melakukan konfirmasi kepada keluarga dengan nilai T apakah benar-benar keluarga yang memang tidak mengikuti program KB atau keluarga tersebut masih berencana memiliki anak atau status nya memiliki pasangan atau usia menopause atau tidak.

Dari tabel di atas, permasalahan pada capaian IKS adalah Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur sebesar 39,72%; Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 64,65%; Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 54,83%; Anggota keluarga tidak ada yang merokok 61,42%; dan Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan 65,15%.

Dalam pelaporan survei IKS Kota Blitar mengalami beberapa kendala antara lain data intervensi tahun 2023 belum optimal terlapor pada aplikasi PIS-PK, sehingga diperlukan *back up* pendataan dengan tetap memberikan

intervensi kepada masyarakat dengan tingkat capaian indikator IKS yang masih rendah.

Sasaran 2 “Meningkatnya kinerja perangkat daerah”, merupakan indikator penunjang administrasi perangkat daerah, yaitu:

h. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 adalah 85,07 termasuk dalam kategori A dari target A (85,72) maka capaiannya sebesar 99,24%.

Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah:

- Agar dalam menetapkan target kinerja pada dokumen perencanaan, memperhatikan dan mengacu pada target dan hasil pengukuran kinerja pada tahun sebelumnya.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pengukuran capaian kinerja organisasi (Aplikasi A-SAKIP).
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja organisasi dengan melengkapi analisis lebih mendalam (antara lain terkait analisa faktor pendukung dan penghambat/kendala capaian kinerja, strategi dan kebijakan dalam meningkatkan kinerja) pada laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi, evaluasi RKPD, serta LKj IP.
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2023-2024 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

N o	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	5		6	8		9	11		12
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	73,95	74,26	74,27	74,26	74,97	75,20	100,42	100,96	101,25
A.	<i>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</i>	Angka Kematian Ibu (AKI)	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	500 per-100.000 kelahiran hidup	98,14 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	173,99 per-100.000 kelahiran hidup	170,46	190,46	22,71
		Angka Kematian Bayi (AKB)	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	9,93 per-1.000 kelahiran hidup	9,09 per-1.000 kelahiran hidup	9,19 per-1.000 kelahiran hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	7,39 per-1.000 kelahiran hidup	111,63	151,96	118,70
		Prevalensi balita stunting	7,05%	7%	6,95%	5,26%	7,64%	6,87%	125,39	90,86	101,15
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,1%	15,2%	46,1%	34,62%	30,9%	33,15%	229,27	203,29	71,91
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	45%	65%	75%	26,19%	77,27%	76,92%	58,2	118,88	102,56

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	N/A	N/A	84 (indeks)	N/A	N/A	86,78 (indeks)	N/A	N/A	103,31
		Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	0,50 (skala)	0,60 (skala)	0,70 (skala)	0,35 (skala)	0,41 (skala)	0,79 (skala)	70	68,33	112,86
2.	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Dina Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (87)	A (85,72)	A (86,61)	A (85,08)	A (85,07)	99,55	97,79	99,24
B.	<i>Meningkatnya kinerja perangkat daerah</i>	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (87)	A (85,72)	A (86,61)	A (85,08)	A (85,07)	99,55	97,79	99,24

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 terhadap target periode akhir Rencana Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi s/d 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	74,30	75,20	101,21
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	173,99 per-100.000 kelahiran hidup	(-154,56)
	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,51 per-1.000 kelahiran hidup	7,39 per-1.000 kelahiran hidup	113,16
	Prevalensi balita stunting	6,80%	6,87%	98,97
	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	30%	33,15%	110,5
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terakreditasi	100%	76,92%	76,92
	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,85 (skala)	0,79 (skala)	92,94
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (85,07)	97,78

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur (Target SPM)

Indikator pada Tujuan Renstra Dinas Kesehatan merupakan Indikator Derajat Kesehatan, data capaian yang diperoleh merupakan data tahun 2024. Dalam rangka pencapaian target renstra, Dinas Kesehatan didukung oleh pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Adapun perbandingan realisasi kinerja SPM Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan realisasi Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 dengan Realisasi Provinsi
Jawa Timur

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Tahun 2024	Realisasi Daerah Tahun 2024	Ket.
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	94,28%	98,8%	+
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95,01%	98,97%	+
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,11%	100%	+
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	97,14%	99,67%	+
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,81%	100%	+

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Tahun 2024	Realisasi Daerah Tahun 2024	Ket.
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,68%	100%	+
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	98,13%	99,5%	+
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,04%	100%	+
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,53%	100%	+
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98,82%	98,98%	+
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	99,76%	100%	+
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	99,18%	100%	+

Keterangan : + realisasi daerah lebih besar dari realisasi provinsi
- realisasi daerah lebih kecil dari realisasi provinsi

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup untuk penyelenggaraan layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Blitar dan 3 (tiga) UPT Puskesmas, yaitu UPT Puskesmas Kepanjenkidul, UPT Puskesmas Sukorejo dan UPT Puskesmas Sananwetan.

Untuk mengetahui prosentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Anggaran Belanja Daerah pada Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan Keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	591.830.869,00	0,65
		Angka Kematian Balita (AKB)	34.403.800,00	0,04
		Prevalensi Balita Stunting	867.504.700,00	0,96
		Cakupan pelayanan kesehatan	43.063.971.688,00	47,47
		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	12.000.577.806,00	13,23
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	2.666.311.271,00	2,94
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kota Blitar	31.492.277.533,00	34,71
Jumlah			90.716.877.667,00	100

Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
Dinas Kesehatan		86.247.427.226,00	83.631.605.065,00	96,97
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	51.130.186.777,00	49.135.787.035,00	96,10
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.415.814.840,00	6.034.123.917,00	94,05
	1. Pengembangan Puskesmas	513.333.000,00	448.000.760,00	87,27
	2. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.474.199.138,00	3.187.615.650,00	91,75
	3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	667.580.000,00	659.041.292,00	98,72
	4. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.805.639,00	5.927.400,00	87,10
	5. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	146.790.864,00	142.024.120,00	96,75
	6. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.592.168.868,00	1.576.589.695,00	99,02
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	1.060.000,00	1.060.000,00	100
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.497.466.551,00	42.891.323.558,00	96,39
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	170.935.869,00	167.991.200,00	98,28
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.760.800,00	10.760.800,00	100
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30.874.800,00	25.600.000,00	82,92
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5.046.000,00	5.046.000,00	100
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.738.000,00	16.737.800,00	100
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27.561.800,00	26.811.800,00	97,28
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.091.300,00	6.091.300,00	100
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.017.900,00	10.017.900,00	100
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	300.832.800,00	297.323.800,00	98,83
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	33.500.000,00	33.500.000,00	100
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	421.288.000,00	314.722.450,00	74,70
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	83.031.100,00	82.789.492,00	99,71
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	200.706.800,00	200.706.800,00	100
	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.100.000,00	2.100.000,00	100
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	128.762.500,00	125.792.000,00	97,69
	16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.375.363,00	14.914.800,00	97,00

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	138.309.971,00	137.718.000,00	99,57
18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	275.880.262,00	263.057.700,00	95,35
19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.045.000,00	1.045.000,00	100
20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56.720.200,00	54.217.600,00	95,59
21.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	21.187.500,00	19.805.540,00	93,48
22.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	639.418.346,00	587.826.100,00	91,93
23.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.398.796.073,00	28.573.629.986,00	97,19
24.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	34.300.000,00	24.611.600,00	71,75
25.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	40.582.949,00	40.101.000,00	98,81
26.	Operasional Pelayanan Puskesmas	9.526.861.970,00	9.284.238.161,00	97,45
27.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	275.927.738,00	267.260.944,00	96,86
28.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	53.269.356,00	46.497.200,00	87,29
29.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	29.003.800,00	28.989.800,00	99,95
30.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12.733.500,00	12.733.500,00	100
31.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2.392.461.000,00	2.073.003.451,00	86,65
32.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	14.790.854,00	13.126.834,00	88,75
33.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	122.555.000,00	122.555.000,00	100
c.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	177.161.016,00	173.611.200,00	98
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	177.161.016,00	173.611.200,00	98
d.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.744.370,00	36.728.360,00	92,41
1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	35.124.370,00	32.108.360,00	91,41
2.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.620.000,00	4.620.000,00	100
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	698.275.900,00	671.706.400,00	96,19
a.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	21.135.600,00	20.248.100,00	95,80
1.	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	21.135.600,00	20.248.100,00	95,80
b.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	214.286.900,00	202.357.800,00	94,43
1.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	19.399.500,00	19.270.000,00	99,33
2.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	194.887.400,00	183.087.800,00	93,95
c.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	462.853.400,00	449.100.500,00	97,03
1.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	462.853.400,00	449.100.500,00	97,03
III	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	400.567.045,00	399.725.910,00	99,79

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
a.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	19.930.237,00	19.924.100,00	99,97
1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	19.930.237,00	19.924.100,00	99,97
b.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6.500.536,00	6.500.400,00	100
1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6.500.536,00	6.500.400,00	100
c.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	158.237.900,00	158.237.600,00	100
1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	158.237.900,00	158.237.600,00	100
d.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	636.659,00	632.500,00	99,35
1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	636.659,00	632.500,00	99,35
f.	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	598.613,00	594.000,00	99,23
1.	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	598.613,00	594.000,00	99,23
c.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	214.663.100,00	213.837.310,00	99,62
1.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	214.663.100,00	213.837.310,00	99,62
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.526.119.971,00	2.486.772.832,00	98,44
a.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.386.384.996,00	2.348.338.532,00	98,41
1.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.386.384.996,00	2.348.338.532,00	98,41
c.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	139.734.975,00	138.434.300,00	99,07

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	139.734.975,00	138.434.300,00	99,07
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.492.277.533,00	30.937.612.888,00	98,24
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.345.494,00	38.801.700,00	98,62
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.516.094,00	19.472.500,00	99,78
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.829.400,00	19.329.200,00	97,48
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.623.833.902,00	27.301.567.187,00	98,83
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.612.001.902,00	27.289.787.487,00	98,83
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.832.000,00	11.779.700,00	99,56
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	282.335.029,00	281.962.929,00	99,87
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.482.500,00	74.482.500,00	100
	2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.660.000,00	10.660.000,00	100
	3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	197.192.529,00	196.820.429,00	99,81
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.238.050,00	530.834.501,00	99,74
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.534.554,00	14.533.800,00	99,99
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.762.566,00	33.759.600,00	99,99
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.824.548,00	21.824.100,00	100
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.010.000,00	33.982.500,00	99,92
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.509.475,00	61.509.200,00	100
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.180.000,00	9.180.000,00	100
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.916.907,00	286.913.801,00	100
	8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	70.500.000,00	69.131.500,00	98,06
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.231.890,00	110.178.000,00	99,05
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.231.890,00	110.178.000,00	99,05
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.355.949.660,00	2.136.122.637,00	90,67
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.654.000,00	239.457.653,00	93,30
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.099.295.660,00	1.896.664.984,00	90,35
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.343.508,00	538.145.934,00	98,32
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.463.000,00	201.924.337,00	96,86
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.880.508,00	88.880.500,00	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	247.341.097,00	98,94
	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	1.369.810.369,00	1.279.648.420,00	93,42
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.319.488.269,00	1.230.576.320,00	93,26
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	431.002.000,00	425.572.206,00	98,74

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	68.349.200,00	65.056.600,00	95,18
	2. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
	3. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	336.312.800,00	334.175.606,00	99,36
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	1.140.000,00	1.140.000,00	100
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	888.004.169,00	805.004.114,00	90,65
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.325.000,00	12.325.000,00	100
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	45.157.000,00	45.157.000,00	100
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.050.000,00	1.040.000,00	99,05
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.050.000,00	1.040.000,00	99,05
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.960.000,00	5.737.057,00	82,43
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.636.400,00	2.636.400,00	100
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	700.000,00	660.000,00	94,29
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.400.000,00	1.400.000,00	100
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.080.000,00	1.080.000,00	100
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.200.000,00	4.200.000,00	100
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.308.400,00	10.308.000,00	100
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.090.000,00	6.090.000,00	100
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	219.425.000,00	185.623.950,00	84,60
	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	770.000,00	770.000,00	100
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.200.000,00	8.200.000,00	100
	16. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5.720.000,00	5.720.000,00	100
	17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50.715.900,00	48.825.500,00	96,27
	18. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.218.000,00	103.390.590,00	98,26
	19. Operasional Pelayanan Puskesmas	358.561.369,00	315.939.917,00	88,11
	20. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.916.000,00	10.216.000,00	93,59
	21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	28.947.000,00	28.232.000,00	97,53
	22. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	6.574.100,00	6.412.700,00	97,54
	c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	482.100,00	0,00	0,00
	1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	482.100,00	0,00	0,00
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	50.322.100,00	49.072.100,00	97,52
	a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.322.100,00	49.072.100,00	97,52
	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50.322.100,00	49.072.100,00	97,52

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
UPT Puskesmas Sukorejo		1.528.181.182,00	1.477.561.828,00	96,69
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.474.685.782,00	1.425.866.428,00	96,69
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	493.640.000,00	462.526.284,00	93,70
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80.796.026,00	80.004.000,00	99,02
	2. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.000.000,00	16.102.900,00	76,68
	3. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	391.843.974,00	366.419.384,00	93,51
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	970.831.182,00	963.340.144,00	99,23
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.318.000,00	15.318.000,00	100
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	36.311.300,00	36.311.300,00	100
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.000.000,00	6.000.000,00	100
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	186.101,00	186.000,00	99,95
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	560.000,00	560.000,00	100
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	233.414.500,00	233.198.700,00	99,91
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.200.000,00	8.200.000,00	100
	8. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	51.083.800,00	48.558.400,00	95,06
	9. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	157.071.200,00	156.884.000,00	99,88
	10. Operasional Pelayanan Puskesmas	334.125.281,00	330.570.244,00	98,94
	11. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.810.400,00	10.060.400,00	93,06
	12. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	45.000.000,00	44.750.000,00	99,44
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	66.987.700,00	66.980.200,00	99,99
	14. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	5.762.900,00	5.762.900,00	100
	c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	10.214.600,00	0,00	0,00
	1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.214.600,00	0,00	0,00
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	53.495.400,00	51.695.400,00	96,64
	a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.495.400,00	51.695.400,00	96,64
	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	53.495.400,00	51.695.400,00	96,64
UPT Puskesmas Sananwetan		1.572.095.549,00	1.501.364.736,00	95,50
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.535.721.749,00	1.465.483.936,00	95,43
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	578.387.800,00	574.302.168,00	99,29
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	42.621.658,00	41.880.718,00	98,26

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	2. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	535.766.142,00	532.421.450,00	99,38
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	956.726.649,00	891.181.768,00	93,15
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.784.000,00	2.784.000,00	100
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.547.000,00	25.547.000,00	100
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.479.000,00	2.479.000,00	100
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	120.000,00	120.000,00	100
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	80.000,00	80.000,00	100
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	120.000,00	120.000,00	100
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	240.000,00	240.000,00	100
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	120.000,00	120.000,00	100
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	120.000,00	120.000,00	100
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	80.000,00	80.000,00	100
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32.250.000,00	32.250.000,00	100
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	580.000,00	547.300,00	94,36
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	279.686.700,00	268.798.223,00	96,11
	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.200.000,00	8.200.000,00	100
	15. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	120.000,00	120.000,00	100
	16. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	104.436.900,00	102.548.800,00	98,19
	17. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	68.210.000,00	62.139.931,00	91,10
	18. Operasional Pelayanan Puskesmas	363.799.849,00	317.300.514,00	87,22
	19. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.888.000,00	10.888.000,00	100
	20. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15.000.000,00	15.000.000,00	100
	21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	40.879.200,00	40.878.300,00	100
	22. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	986.000,00	820.700,00	83,24
	c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	607.300,00	0,00	0,00
	1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	607.300,00	0,00	0,00
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	36.373.800,00	35.880.800,00	98,64
	a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.373.800,00	35.880.800,00	98,64
	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36.373.800,00	35.880.800,00	98,64
JUMLAH TOTAL DINAS KESEHATAN		90.716.877.667,00	87.533.226.249,00	96,49

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 87.533.226.249,00** dari total anggaran sebesar **Rp. 90.716.877.667,00** atau sebesar **96,49%**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2024 termasuk **“sangat berhasil”**.

Secara umum kinerja keuangan per-program sudah baik, ada beberapa aktivitas kegiatan yang tidak optimal pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan realisasi sebesar 74,70% dikarenakan harga barang lebih rendah dibandingkan standar harga pada perencanaan pada sumber dana BOK. Sebagai upaya tindak lanjut yaitu pengusulan standar harga yang disesuaikan dengan e-catalogue terbaru.
 - b. Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dengan realisasi sebesar 71,75% dikarenakan realisasi sesuai dengan tagihan pemeriksaan spesimen potensi wabah dan BBLKM Surabaya.

Sedangkan capaian Kinerja Program, sebagai berikut:

Program Kewenangan Wajib Bidang Kesehatan:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Ket.
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	98,8%	98,8	Masih ada kasus abortus
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	98,97%	98,97	Masih ada kasus abortus

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Ket.
Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	100%	100	
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%	99,67%	99,67	Belum semua PAUD melaporkan secara rutin
Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	99,5%	99,5	
Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	98,98%	98,98	3 orang ODGJ pindah domisili

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Ket.
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100	
Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100%	100%	100	
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100	
Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	69,82%	54,13%	77,53	10 kelurahan yang dibina yang sudah mendeklarasikan Kelurahan 5 Pilar STBM
Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	46,15%	77,78%	168,53	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100	

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	100

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	100%	100
Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	92,67%	92,03%	99,31%

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	85,71%	85,71%

Program Non Urusan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,3	90,52%	108,67%

1. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
A. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	98,14 per-100.000 kelahiran hidup	173,99 per-100.000 kelahiran hidup	22,71%	591.830.869,00	587.836.100,00	99,33%
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	98,8%	98,8%	591.830.869,00	587.836.100,00	99,33%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	98,97%	98,97%			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB)	9,09 per-1.000 kelahiran hidup	7,39 per-1.000 kelahiran hidup	118,7%	34.403.800,00	29.119.000,00	84,64%
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	100%	100%	34.403.800,00	29.119.000,00	84,64%
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Prevalensi balita stunting	6,95%	6,87%	101,15%	867.504.700,00	819.618.873,00	94,48%

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%	99,67%	99,67%	867.504.700,00	819.618.873,00	94,48%
	Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,20%	30,9%	203,29%	43.063.971.688,00	41.338.983.316,00	95,99%
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	123,57%	123,57%	43.063.971.688,00	41.338.983.316,00	95,99%
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			
	Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	99,5%	97,7%			
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	98,98%	98,98%			
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100%			
	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100%	100%	100%			

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100%			
	Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	69,82%	54,13%	77,53%			
	Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	46,15%	77,78%	168,54%			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	75%	76,92%	102,56%	12.000.577.806,00	11.196.634.940,00	93,30%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	84 (indeks)	86,78 (indeks)	103,31%			
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	10.902.371.520,00	10.125.835.130,00	92,88%
2. Program Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	100%	698.275.900,00	671.706.400,00	96,19%

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	100%	100%	399.930.386,00	399.093.410,00	99,79%
	Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	92,67%	92,03%	99,31%			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,70	0,79	112,86%	2.666.311.271,00	2.623.421.132,00	98,39%
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	85,71%	100%	2.666.311.271,00	2.623.421.132,00	98,39%
B. Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (85,72)	A (85,07)	99,24%	31.492.277.533,00	30.937.612.888,00	98,24%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,3	90,52	108,67%	31.492.277.533,00	30.937.612.888,00	98,24%
Total					90.716.877.667,00	87.533.226.249,00	96,49%

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Ket.
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	90,41	95,56	0,95	Tidak efisien
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	99,24	98,24	1,01	Efisien

Tingkat efisien capaian kinerja terhadap penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2024 pada Sasaran Meningkatnya kinerja perangkat daerah mengalami efisiensi, sedangkan pada Sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan mengalami tidak efisiensi. Adapun indikator kinerja sasaran tersebut yang mengakibatkan ketidakefisiensien adalah:

1. Angka Kematian Ibu (AKI) dengan tingkat efisiensi sebesar 0,23. Jumlah kematian ibu meningkat empat kali dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari target, disebabkan oleh belum dilakukan skrining Penyakit Jantung pada ibu hamil (Ibu disertai penyakit penyerta), kompetensi dari kader pendamping bumil risti belum terukur, kegiatan drill kegawatdaruratan belum dilakukan secara periodik di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RS), ibu hamil dalam kondisi 4T (terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak), adanya faktor medis dan non medis terkait (diagnosis, tatalaksana serta koordinasi antar tenaga kesehatan). Pencegahan dan penanganan permasalahan pada kesehatan ibu hamil dan bersalin

dapat diselesaikan melalui peningkatan kualitas layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, serta kerjasama lintas sektor dalam mendukung keselamatan dan kesehatan ibu hamil dan bersalin.

2. Angka Kematian Bayi (AKB) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,40. Jumlah kematian bayi berkurang dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih rendah dari target, dipengaruhi oleh kualitas penanganan bayi baru lahir sampai usia 28 hari yang sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir sampai usia 28 hari dapat diselesaikan melalui peningkatan kualitas layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, serta kerjasama lintas sektor dalam mendukung keselamatan bayi baru lahir.
3. Prevalensi balita stunting dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Prevalensi balita stunting tahun ini menurun dari tahun sebelumnya, tetapi akan tetap dilakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan stunting berupa kerjasama dengan lintas sektor dalam peningkatan kualitas hidup yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain, ekonomi, pendidikan dan sosial. Gerakan aksi bergizi pada remaja, pemberian TTD pada remaja putri, sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan stunting melalui media cetak dan elektronik, dan penyuluhan langsung tentang pencegahan stunting ke SMP dan SMA melalui UKS dan kader kesehatan remaja adalah beberapa upaya pencegahan stunting sejak dini.
4. Cakupan pelayanan kesehatan Masyarakat dengan tingkat efisiensi 0,75. Pencapaian kinerja terhadap capaian pelayanan kurang dari target. Hal ini dikarenakan belum semua fasilitas kesehatan di Kota Blitar melaporkan pelayanan kesehatannya ke Dinas Kesehatan, sehingga akan dilakukan fasilitasi secara bertahap aplikasi RME (rekam medik elektronik) untuk meningkatkan cakupan pelaporan kesehatan ke Dinas Kesehatan.
5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan

tingkat efisiensi 1,10. Jumlah fasyankes yang terakreditasi pada tahun 2024 bertambah dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.

6. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar, tingkat efisiensi sebesar 1,14. Hal tersebut dikarenakan capaian kinerja IKS Kota Blitar lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian IKS Kota Blitar tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Maka, penyerapan anggaran sebagai upaya peningkatan IKS Kota Blitar cukup berhasil dalam upaya peningkatan capaian IKS Kota Blitar. Pelaksanaan intervensi terhadap keluarga dengan kriteria yang belum memenuhi syarat adalah upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan IKS Kota Blitar. Selain itu, permasalahan dalam pelaporan IKS adalah belum terupdatenya data pada aplikasi PIS-PK, sehingga dilaksanakan upaya pelaporan manual terhadap capaian IKS yang belum terupdate pada aplikasi PIS-PK.
7. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan tingkat efisiensi 1,01. Pencapaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan kategori A tidak luput dari peran serta seluruh jajaran Dinas Kesehatan dalam upaya pencapaian kinerja OPD, serta keterlibatan OPD terkait dalam peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar.

C. Prestasi/Penghargaan

Pada Tahun 2024, ada 4 (empat) penghargaan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu:

1. Penghargaan Kota Blitar atas Partisipasinya dalam verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Kabupaten Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kab/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan

kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah

Manfaat dari penyelenggaraan KKS adalah meningkatnya kinerja pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mewujudkan pembangunan kab/kota yang berwawasan kesehatan berkelanjutan antara lain:

- a. Meningkatnya masyarakat hidup sehat.
- b. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan (kab/kota, tempat pengolahan makanan/tempat dan fasilitas umum/fasilitas pelayanan kesehatan sehat, air minum aman, kualitas udara indoor, rumah sehat),
- c. Penurunan kejadian penyakit menular dan tidak menular
- d. Peningkatan peran masyarakat dan swasta peduli Kesehatan
- e. Layanan fasilitas 9 tatanan kab/kota yang terstandar

Terhadap Kabupaten Kota Sehat, diberikan penghargaan “SWASTI SABA” yang diserahkan di bulan November. Penghargaan ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. PENGHARGAAN PADAPA, untuk klasifikasi pemantapan jika mengikuti penilaian minimal 2 tatanan
- b. PENGHARGAAN WIWERDA, untuk klasifikasi pembinaan jika mengikuti penilaian minimal 3 atau 4 tatanan
- c. PENGHARGAAN WISTARA, untuk klasifikasi pengembangan jika mengikuti penilaian lebih dari 5 tatanan

Terdapat 9 tatanan dalam kabupaten kota sehat, yaitu :

- a. Kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum yang sehat
- b. Kawasan sarana tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi yang sehat
- c. Kawasan industri dan perkantoran yang sehat
- d. Ketahanan pangan dan gizi
- e. Kehidupan masyarakat yang sehat yang mandiri
- f. Kehidupan sosial yang sehat
- g. Lingkungan pemukiman yang sehat

- h. Lingkungan kerja yang sehat
- i. Ketahanan bencana

Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat oleh Provinsi Jawa Timur diadakan 2 tahun sekali yang berselang dengan Penilaian Kabupaten/Kota Sehat yang dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk persiapan penilaian Kota Sehat untuk Kota Blitar tahun 2025.

2. Penghargaan Kota Blitar sebagai Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Madya Tahun 2024.

Kabupaten/kota STBM adalah kabupaten/kota yang telah menerapkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah program nasional yang bertujuan untuk mengubah perilaku sanitasi dan higiene masyarakat.

STBM menekankan pada 5 pilar perubahan perilaku, yaitu:

- Stop buang air besar sembarangan (stop BABS)
- Cuci tangan pakai sabun (CTPS)
- Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga (PAMM-RT)
- Pengamanan sampah rumah tangga (PS RT)
- Pengamanan limbah cair rumah tangga (PLC RT)

3. Penghargaan SAKIP OPD Kategori A Kota Blitar Tahun 2024.
4. Penghargaan Kota Blitar atas Kabupaten/Kota terbaik dalam rangka kewaspadaan dini dan respon terhadap Penyakit yang menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah Tahun 2024.
5. Peran serta Dinas Kesehatan dalam peraihan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori **Madya**

Kota Layak Anak merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak, hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Setiap tahunnya ada penilaian dan penghargaan yang diberikan pada kota-kota ramah anak.

Penghargaan KLA ini diberikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA). Sedangkan untuk kategori KLA ini ada 5 (lima) yaitu :

- a. Kategori Pratama
- b. Kategori Madya
- c. Kategori Nindya
- d. Kategori Utama
- e. Kategori KLA

Kriteria penilaian evaluasi KLA ini meliputi:

- a. Penguatan kelembagaan
- b. Hak sipil dan kebebasan
- c. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- d. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
- e. Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya
- f. Hak perlindungan khusus

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	98,14 per-100.000 kelahiran hidup	173,99 per-100.000 kelahiran hidup	22,71
	Angka Kematian Bayi (AKB)	9,09 per-1.000 kelahiran hidup	7,39 per-1.000 kelahiran hidup	118,70
	Prevalensi balita stunting	6,95%	6,87%	101,15
	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	46,1%	33,15%	71,91
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	75%	76,92%	102,56
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	84 (indeks)	86,78 (indeks)	103,31
	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Sehat	0,70 (skala)	0,79 (skala)	112,56
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (85,72)	A (85,07)	99,24
Rata-rata capaian kinerja				91,56%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2024 termasuk kategori 2 (satu) dengan nilai rata-rata capaian kinerja 91,56% atau **"berhasil"**.

Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan						
Angka Kematian Ibu (AKI)	98,14 per-100.000 kelahiran hidup	173,99 per-100.000 kelahiran hidup	22,71%	591.830.869,00	587.836.100,00	99,33%
Angka Kematian Bayi (AKB)	9,09 per-1.000 kelahiran hidup	7,39 per-1.000 kelahiran hidup	118,7%	34.403.800,00	29.119.000,00	84,64%
Prevalensi balita stunting	6,95%	6,87%	101,15%	867.504.700,00	819.618.873,00	94,48%
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	46,1%	33,15%	77,15%	43.063.971.688,00	41.338.983.316,00	95,99%
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	75%	76,92%	102,56%	12.000.577.806,00	11.196.634.940,00	93,30%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	84 (indeks)	86,78 (indeks)	103,31%			
IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,70 (skala)	0,79 (skala)	112,56%	2.666.311.271,00	2.623.421.132,00	98,39%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah						
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (85,72)	A (85,07)	99,24%	31.492.277.533,00	30.937.612.888,00	98,24%
Total				90.716.877.667,00	87.533.226.249,00	96,49

Akuntabilitas kinerja tinggi dengan 5 (lima) dari 8 (delapan) indikator sasaran mencapai target. Adapun 3 (tiga) indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu (1) Angka Kematian Ibu (AKI) masih belum mencapai target karena pada tahun 2024 jumlah kematian ibu bertambah dibanding tahun sebelumnya; (2) Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat karena kunjungan hanya dari Puskesmas; dan (3) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Sedangkan akuntabilitas keuangan/kinerja keuangan sebesar **96,49%** dikategorikan "**sangat berhasil**", seperti pada tabel di bawah ini, masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

B. Langkah Perbaikan

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar upaya yang harus dilakukan:

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Kesehatan Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1.	Mengurangi jumlah kematian ibu	Melaksanakan skrining penyakit jantung akan dijadikan salah satu standar yang wajib dilakukan dalam pemeriksaan ibu hamil	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	√		
		Melaksanakan pelatihan 25 kompetensi kader posyandu kesehatan	• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Keg. Pengembangan dan Pelaksanaan	√		

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
		Melaksanakan drill kegawatdaruratan maternal neonatal bagi tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RS) se-Kota Blitar	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	√		
		Melaksanakan koordinasi terkait pembentukan dan evaluasi jejaring skrining layak hamil dan ANC	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	√		
		Melaksanakan Pendampingan oleh Tim Ahli (Sp. OG) ke Puskesmas dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal dan audit Kasus Kematian Ibu	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	√		

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		dan Anak per 3 bulanan	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
2.	Mengurangi jumlah kematian bayi	Melaksanakan refresing managemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	√		
		Melaksanakan monev Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR), monev Skrining Hipoteroid Kongenital (SHK) dan pendampingan tim ahli tetap ditingkatkan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	√		
		Melaksanakan refreshing tatakelola Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) bagi tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			√

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
		Rekomendasi dari Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) segera ditindaklanjuti	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	√		
3.	Menurunkan prevalensi balita stunting	Gerakan aksi bergizi pada remaja	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	√		
		Pemberian TTD pada remaja putri	Dropout dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	√		
		Sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan stunting melalui media cetak dan elektronik	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	√		

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		Penyuluhan langsung tentang pencegahan stunting ke SMP dan SMA melalui UKS dan kader kesehatan remaja	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	√		
4.	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan	Memfasilitasi secara bertahap aplikasi RME (rekam medik elektronik) untuk meningkatkan cakupan pelaporan kesehatan ke Dinas Kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - Sub Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	√		√
5.	Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Sosialisasi dan monev secara berkala terhadap regulasi terkait akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang baru	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	√		√
6.	Meningkatkan nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Intervensi lanjutan tetap dilakukan berdasarkan capaian indikator yang belum tercapai dan yang memungkinkan untuk diintervensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√		

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			- Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR



dr. DHARMA SETIAWAN, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680305 200112 1 003

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021 – 2026**

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat

MISI : Meningkatkan sumber daya manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

TUJUAN									SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73,75 tahun	73,95 tahun	74,26 tahun	74,27 tahun	74,29 tahun	74,30 tahun	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah Kematian Ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran Hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali Konstanta (100.000) bayi lahir hidup	189,13 per-100.000 kelahiran hidup	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	500 per-100.000 kelahiran hidup	98,14 per-100.000 kelahiran hidup	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	a. peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan b. peningkatan penanganan komplikasi saat dan pasca persalinan c. peningkatan kunjungan K1 dan K4	
										Angka kematian Bayi (AKB)	Jumlah Kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran Hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	11,82 per-1.000 kelahiran hidup	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	9,93 per-1.000 kelahiran hidup	9,09 per-1.000 kelahiran hidup	8,98 per-1.000 kelahiran hidup	8,51 per-1.000 kelahiran hidup	Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita	a. Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) b. Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) c. Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) d. peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang	
										Prevalensi balita stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	7,25%	7,05%	7%	6,95%	6,90%	6,80%	Peningkatan penanganan stunting	a. Pemenuhan gizi ibu hamil b. Peningkatan gizi balita	

TUJUAN									SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
										Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	NA	15,10%	15,2%	28%	29%	30%	Peningkatan pelayanan kesehatan	a. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan b. Peningkatan sistem pelayanan rujukan c. Pemenuhan kualitas standar pelayanan kesehatan di rumah sakit d. Peningkatan layanan kegawatdaruratan e. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan f. Pengembangan layanan <i>home care</i>	
																		Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	a. Optimalisasi edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular b. Peningkatan pengetahuan tentang PHBS	
										Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	45%	45%	65%	75%	85%	100%	Peningkatan akreditasi fasyankes	a. Peningkatan pembinaan akreditasi fasyankes b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	
										IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%	0,24 (skala)	0,50 (skala)	0,60 (skala)	0,70 (skala)	0,80 (skala)	0,85 (skala)	Peningkatan jaminan akses pelayanan kesehatan	Peningkatan jaminan akses pelayanan kesehatan melalui program-program kesehatan di fasilitas pelayanan	

TUJUAN									SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar		A	A (87)	A (85,72)	A (86,36)	A (87)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A	A (87)	A (87)	A (85,72)	A (86,36)	A (87)	Peningkatan kinerja perangkat daerah	a. Peningkatan sarana prasarana perkantoran b. Peningkatan koordinasi antar bidang dan lintas sektor	

Blitar, 3 Februari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR



dr. DIARMA SUTIAWAN, M.MKes.
NIP. 19600305 200112 1 003

RENCANA KINERJA TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	98,14 per-100.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2339 orang	170.935.869	DINKES
											Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	640 orang	12.325.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	787 orang	15.318.000	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	874 orang	2.784.000	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	122.555.000	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	6.574.100	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	5.762.900	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	986.000	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 dokumen	28.947.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN										
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 dokumen	66.987.700	UPT Puskesmas Sukorejo						
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 dokumen	40.879.200	UPT Puskesmas Sananwetan						
											Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2328 orang	10.760.800	Dinkes
											Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	611 orang	45.157.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul						
											Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	787 orang	36.311.300	UPT Puskesmas Sukorejo						
											Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	870 orang	25.547.000	UPT Puskesmas Sananwetan						
		Angka kematian Bayi (AKB)	9,09 per-1.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2169 orang	30.874.800	Dinkes						
											Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	580 bayi	1.050.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul						
											Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	809 orang	2.479.000	UPT Puskesmas Sananwetan						

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Prevalensi balita stunting	6,95%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8694 orang	5.046.000	Dinkes
											Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.979 orang	1.050.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3243 orang	120.000	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5 dokumen	128.762.500	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 dokumen	219.425.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 dokumen	233.414.500	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 dokumen	279.686.700	UPT Puskesmas Sananwetan
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	46,1%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20014 orang	16.738.000	Dinkes
											Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5025 orang	6.960.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6817 orang	6.000.000	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6533 orang	80.000	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100148 orang	27.561.800	Dinkes
											Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26543 orang	2.636.400	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34578 orang	120.000	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21801 orang	6.091.300	Dinkes
											Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6782 orang	700.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8113 orang	240.000	UPT Puskesmas Sananwetan

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49633 orang	10.017.900	Dinkes
					Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13563 orang	1.400.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17663 orang	120.000	UPT Puskesmas Sananwetan
											Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4061 orang	300.832.800	Dinkes
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1233 orang	1.080.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1729 orang	120.000	UPT Puskesmas Sananwetan
											Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	294 orang	33.500.000	Dinkes
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	109 orang	4.200.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar			

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	142 orang	80.000	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10 orang	21.187.500	Dinkes
					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2854 orang	421.288.000	Dinkes
											Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1150 orang	10.308.400	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	690 orang	186.101	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	791 orang	32.250.000	UPT Puskesmas Sananwetan
											Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43 orang	45.000.000

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 orang	15.000.000	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3410 orang	83.031.100	Dinkes
											Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	976 orang	6.090.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	960 orang	560.000	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1350 orang	580.000	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18 dokumen	29.398.796.073	Dinkes
								Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%					
										Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	48 dokumen	9.526.861.970	Dinkes
											Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	12 dokumen	358.561.369	UPT Puskesmas Kepanjenkidul

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	12 dokumen	334.125.281	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	12 dokumen	363.799.849	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	90,4%	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 laporan	29.003.800	Dinkes
					Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	2 dokumen	200.706.800	Dinkes
										Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	7 dokumen	56.720.200	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 dokumen	50.715.900	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 dokumen	51.083.800	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 dokumen	104.436.900	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	639.418.346	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	105.218.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
											Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	157.071.200	UPT Puskesmas Sukorejo	
											Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	68.210.000	UPT Puskesmas Sananwetan	
											Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	56 paket	34.300.000	Dinkes
											Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1 dokumen	12.733.500	Dinkes
											Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	36 orang	14.790.854	Dinkes
											Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1 dokumen
						Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	69,82%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	68,12%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 dokumen	138.309.971	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	93,71%		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 dokumen	8.200.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
								Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	57,14%		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 dokumen	8.200.000	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 dokumen	8.200.000	UPT Puskesmas Sananwetan
								Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	Penyelenggara an Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 dokumen	40.582.949	Dinkes
								Persentase program prioritas yang dipromosikan	100%	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3 dokumen	275.880.262	Dinkes
					Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	46,15%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 dokumen	5.720.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 dokumen	120.000	UPT Puskesmas Sananwetan
								Jumlah Pos UKK yang terbina	10 Pos UKK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 dokumen	15.375.363	Dinkes
								Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	67%		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 dokumen	770.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
								Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	15%					

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	75%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar	100%	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	7 dokumen	275.927.738	Dinkes
		Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12 dokumen								10.916.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul		
		Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12 dokumen								10.810.400	UPT Puskesmas Sukorejo		
		Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12 dokumen								10.888.000	UPT Puskesmas Sananwetan		
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							13 unit	53.269.356	Dinkes		
		Persentase penyehat tradisional yang berizin	7,51%							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	3 dokumen	1.045.000	Dinkes
		Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%							Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	2.392.461.000	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	2 unit	513.333.000	Dinkes
										Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 unit	3.474.199.138	Dinkes
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	1 unit	667.580.000	Dinkes
										Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	6 unit	6.805.639	Dinkes
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	60 unit	68.349.200	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	50 unit	80.796.026	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	8 unit	42.621.658	UPT Puskesmas Sananwetan

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	60 unit	146.790.864	Dinkes		
										Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	10 unit	25.200.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul			
										Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	3 unit	21.000.000	UPT Puskesmas Sukorejo			
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	2841 keluarga	1.060.000	Dinkes		
											Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	55 keluarga	1.140.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul		
										Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	6 paket	1.592.168.868	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	5 paket	336.312.800	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	2 paket	391.843.974	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	3 paket	535.766.142	UPT Puskesmas Sananwetan
										Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	12 paket	13.877.331	Dinkes
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100%	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	3 dokumen	177.161.016	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	12 dokumen	482.100	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	12 dokumen	10.214.600	UPT Puskesmas Sukorejo

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	12 dokumen	607.300	UPT Puskesmas Sananwetan
							Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	100%	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 unit	35.124.370	Dinkes
										Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	2 dokumen	4.620.000	Dinkes
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	100%	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	270 dokumen	21.135.600	Dinkes
							Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	100%	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	39 orang	19.399.500	Dinkes
										Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	4 dokumen	194.887.400	Dinkes
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	18%	Pengembang-an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	25 orang	462.853.400	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	100%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kes., dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	5 dokumen	19.930.237	Dinkes
							Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina	100%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	6.500.536	Dinkes
							Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang berizin	93%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	2 dokumen	158.237.900	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga, rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan	79%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	1 dokumen	636.659	Dinkes
							Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	81%	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen	598.613	Dinkes
							Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi	93%	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	63 unit	214.663.100	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,70 (skala)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga sehat	60,2%	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	8 dokumen	2.386.384.996	Dinkes
								Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri	100%					
								Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	100%					
								Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina	3 kelompok UKBM					
							Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 kelompok UKBM	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 dokumen	139.734.975	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen	50.322.100	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen	53.495.400	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen	36.373.800	UPT Puskesmas Sananwetan

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 dokumen	19.516.094	Dinkes
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		11 laporan	19.829.400	Dinkes		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	293 orang/ bulan	27.612.001.902	Dinkes
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	11.832.000	Dinkes
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	74.482.500	Dinkes
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 dokumen	10.660.000	Dinkes
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	65 orang	197.192.529	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	14.534.554	Dinkes
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	33.762.566	Dinkes
										Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	21.824.548	Dinkes
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 paket	34.010.000	Dinkes
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	61.509.475	Dinkes
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	9.180.000	Dinkes
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 laporan	286.916.907	Dinkes
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	70.500.000	Dinkes
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	80%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	111.231.890	Dinkes
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	256.654.000	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	2.099.295.660	Dinkes
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 unit	208.463.000	Dinkes
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	170 unit	88.880.508	Dinkes
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	250.000.000	Dinkes
JUMLAH PAGU ANGGARAN													90.716.877.667	

Blitar, 3 Februari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR


dr. DHARMA S. TIAWAN, M.MKes
NID. 7688305 200112 1 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

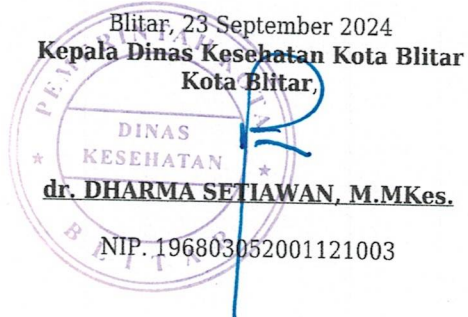
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.**
Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

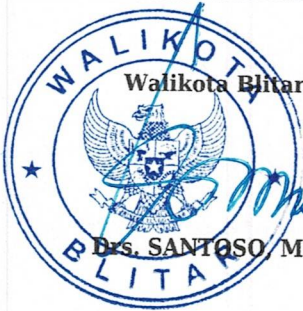
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	98.14(Per-100.00)
		Angka Kematian Bayi (AKB)	9.09(Per-1.000)
		Prevalensi balita stunting	6.95(Persen)
		Cakupan pelayanan kesehatan	46.10(Persen)
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	75.00(Persen)
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.70(Skala)
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	84.00(Indeks)
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	85.72(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2,666,311,271.00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	400,567,045.00	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	698,275,900.00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55,460,082,577.00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alo
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31,492,277,533.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
Total:		90,717,514,326.00	


Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
Kota Blitar,


dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.

NIP. 196803052001121003

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta (100.000) bayi lahir hidup	98,14 per-100.000 kelahiran hidup	173,99 per-100.000 kelahiran hidup	22,71		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	591.830.869,00	587.836.100,00	99,33%	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	9,09 per-1.000 kelahiran hidup	7,39 per-1.000 kelahiran hidup	118,7		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	34.403.800,00	29.119.000,00	84,64%	
		Prevalensi Balita Stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	6,95%	6,87%	101,15		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	867.504.700,00	819.618.873,00	94,48%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	46,1%	33,15%	71,91		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	43.063.971.688,00	41.338.983.316,00	95,99%	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	75%	76,92%	102,56		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.902.371.520,00	10.125.835.130,00	92,88%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Blitar	84 (indeks)	86,78 (indeks)	103,31		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	698.275.900,00	671.706.400,00	96,19%	
								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	399.930.386,00	399.093.410,00	99,79%	
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%	0,70 (skala)	0,79 (skala)	112,56		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.666.311.271,00	2.623.421.132,00	98,39%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (85,72)	A (85,07)	99,24		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	31.492.277.533,00	30.937.612.888,00	98,24%	

Blitar, 5 Februari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR



N. DIANA SETIAWAN, M.MKes.
NIP. 19680205 200112 1 003



DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

Jalan S. Supriyadi No.61, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, 66133